

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Aljannah siti, 2017. *Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa*, Jurnal Fekon Vol.4 NO.1.
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jember.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa*, (1-14).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. *Agamkab.bps.go.id/* diakses 18/4/2021 pukul 13.28 WIB. Keputusan Bupati Agam Nomor 399 tahun 2019 tentang hasil pengelolaan desa dan aset nagari tahun 2019.
- Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Cahyono, Heru. Dkk. 2020. *Pengelolaan Dana Desa: Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Katalog Dalam Terbitan. Jakarta. LIPI
- Eko, Sutoro, 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pembangunan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Mardiasmo, Andy, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Sarana Giid Governance*, Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja ROsdakarya.
- Mudjia, Rahardjo, 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*, Makassar.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diperbarui [PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Peraturan No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Perbup Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian DanPenyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang.

Prof. Dr. Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, R&D, Bandung, hlm 225.

Rencana Kerja Pemerintah **Desa** yang selanjutnya disebut **RKP Desa** merupakan penjabaran dari RPJM **Desa** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan **Desa**, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat **Desa**.

Rencana Kerja Pemerintah **Desa** yang selanjutnya disebut **RKP Desa** merupakan penjabaran dari RPJM **Desa** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan **Desa**, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat **Desa**.

RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri **Dalam** Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (“Permendagri 114/2014”).

RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri **Dalam** Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (“Permendagri 114/2014”).

Satria Mentari Tumbel. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Politik*.

Setiawan, Ade. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Among Makarti*. 11(22) : 23-26.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sukardi, Akhmad, 2009 *Participatory Governance dalam Keuangan Daerah*. Yogyakarta; Laksbang Pressindo.

Supriyadi, Edy, 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU. N. 6 Tahun 2014. *Jurnal IUS*.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, 2017. T. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.

